

Komisi B DPRD DKI Panggil Direksi TransJakarta

JAKARTA (IM) - Komisi B DPRD DKI Jakarta menggelar rapat bersama direksi PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) guna membahas dua kecelakaan beruntun pada pekan lalu. Kecelakaan tersebut melibatkan armada BUMD transportasi tersebut.

"Kita membahas terkait banyaknya kecelakaan dalam 40 hari terakhir yang melibatkan TransJakarta. Kita punya program jangka panjang untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi," kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Azis di Ruang Rapat Komisi B, Gedung DPRD Jakarta, Senin (6/12).

Abdul Azis menilai bahwa kecelakaan beruntun yang melibatkan TransJakarta cukup mencoreng BUMD tersebut sehingga dikhawatirkan memengaruhi keinginan orang untuk beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Dalam rapat tersebut, Direktur Utama TransJakarta, Mochammad Yana memohon maaf kepada para anggota DPRD atas adanya kecelakaan yang melibatkan angkutan umum kebanggaan warga Ibu Kota itu.

Yana menjelaskan, kecelakaan bus TransJakarta paling banyak melibatkan operator PPD dan Mayasari Bhakti. "Kecelakaan bus TransJakarta paling banyak melibatkan mobil pribadi sebanyak 29 persen dan sepeda motor 28 persen," kata Yana.

Dua kecelakaan TransJakarta terjadi dalam dua hari berturut-turut, yakni pada 2 Desember dan 3 Desember 2021. Pada Kamis (2/12), bus TransJakarta dengan operator PT Steady Safe menabrak Pos Polisi di Lampu Merah PGC Cililitan, Jakarta Timur. Kejadian tersebut mengakibatkan satu orang petugas Patroli TransJakarta luka berat.

Kemudian pada Jumat (3/12), bus dari operator PT Mayasari Bhakti menabrak pembatas jalan (separator) busway di depan Ratu Plaza, Senayan. "Kami sudah meminta Pold Metro Jaya untuk melakukan investigasi dan penyelidikan," kata Yana.

Kecelakaan Lagi

Bus TransJakarta kembali mengalami kecelakaan. Garagannya pengemudi lupa menarik rem tangan, membuat bus tersebut menabrak pagar lahan kosong di samping halte Puri Beta 2, Tangerang, Banten, Senin (6/12) pukul 09.10 WIB.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Argo Wiyono membenarkan hal tersebut. Dugaan sementara, kecelakaan itu terjadi karena pengemudi lupa menarik rem tangan sehingga bus berjalan sendiri dan menabrak pagar lahan kosong.

"Setelah proses penurunan pelanggan di Puri Beta 2 pramudi memarkirkan di area pemberhentian terakhir Puri Beta 2 tepatnya di area pemberhentian di lajur sebelah kanan. Selanjutnya pengemudi menuju ke kamar kecil untuk buang air kecil. Pada saat pengemudi keluar dari bus, lalu jalan menuju ke kamar kecil sekitar jarak kurang lebih 10 meter, tiba-tiba bus berjalan sendiri sehingga menabrak tumpukan tanah dan tembok," ujar Argo saat dikonfirmasi.

Di sisi lain, pramudi tersebut berupaya mengejar bus yang melaju. Akan tetapi, sudah terlambat sehingga bus menabrak gundukan tanah dan tembok.

Akibat kecelakaan tersebut, bus TransJakarta mengalami rusak di bagian depan karena menghantam beton separator dan bumper bagian depan pecah dan penyok. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Kecelakaan lalu lintas bus TransJakarta ini bukan yang pertama kali. Pertama, pada Kamis (2/12), bus nomor lambung SAF025 menabrak pos polisi di Traffic Lights PGC, Jakarta Timur. Kecelakaan ini menyebabkan petugas patroli TransJakarta mengalami luka berat.

Selanjutnya, Jumat (3/12), bus nomor lambung MYS17069 menabrak separator busway setelah halte Bundaran Senayan. Dalam tabrakan ini tidak ada korban jiwa. ● yan

4 Metropolis

IDN/ANTARA



UJI COBA PERTANDINGAN LIGA INDONESIA DENGAN PENONTON

Menpora Zainudin Amali (tengah) bersama Ketua PSSI Mochamad Iriawan (kanan) dan Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru Akhmad Hadian Lukita (kiri) memberikan keterangan pers usai menggelar pertemuan terkait persiapan uji coba pertandingan liga sepak bola dengan penonton di Kempenora, Jakarta, Senin (6/12). Uji coba pertandingan sepak bola yang dihadiri penonton secara langsung melalui skema undangan akan mulai dilakukan saat pertandingan delapan besar Liga 2 pada 15 Desember di Stadion Pakansari, Bogor dan Stadion Wibawa Mukti, Cikarang.

DPRD DKI Minta Anies Gandeng Swasta Bangun Tanggul Raksasa

Pembangunan tanggul raksasa ini sangat dibutuhkan masyarakat pesisir Jakarta untuk mencegah banjir rob kembali terjadi. Namun melihat kondisi keuangan APBD 2022, sulit untuk terus melanjutkan pembangunan tanggul raksasa tersebut tepat waktu. Sehingga, salah satu cara yang disarankan dewan adalah mencari pendanaan melalui CSR.

JAKARTA (IM) - Ketua Komisi D DPRD DKI, Ida Mahmudah meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menggandeng swasta sebagai donatur untuk proyek pembangunan national capital integrated coastal development (NCICD) alias tanggul raksasa di pesisir Jakarta.

Hal ini untuk menyaliasi minatnya anggaran pemban-

gunan proyek tersebut pada APBD 2022.

"Pembangunan tanggul pengaman pantai anggarannya di tahun 2022 itu hanya Rp104 miliar, ini kan memang sedikit, Pemda bisa mencari solusi non-APBD," ujar Ida saat dikonfirmasi, Senin (6/12).

Ida menerangkan, pembangunan tanggul raksasa ini sangat dibutuhkan masyarakat

pesisir Jakarta untuk mencegah banjir rob kembali terjadi. Namun melihat kondisi keuangan APBD 2022, sulit untuk terus melanjutkan pembangunan tanggul raksasa tersebut tepat waktu.

Sehingga, salah satu cara yang disarankan dewan adalah mencari pendanaan melalui CSR atau lewat denda koefisien lantai bangunan (KLB) bangunan di Jakarta. Cara ini pernah dipakai Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama atau Ahok untuk membangun Simpang Susun Semanggi.

"Menurut saya ini pasti bisa kalau Pak Gubernurnya mau, niat Pak Gubernur melihat anggaran dan keuangan kita memang sangat sulit," kata Ida.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memulai pembangunan 120 kilometer tanggul

untuk mengatasi penurunan muka tanah di sisi utara Jakarta dan banjir rob.

Pembangunan Fase A sepanjang 48,4 kilometer dilakukan di Pesisir Utara Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan tingkat kerawanan atau penurunan permukaan tanah.

Awalnya, proyek ini menjadi kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan swasta. Akan tetapi, kebijakan ini harus direvisi setelah DKI membatalkan proyek pulau reklamasi.

Sehingga perusahaan

swasta, BUMN dan BUMD yang sebelumnya mendapat jatah pulau reklamasi tak bisa lagi diberikan tanggung jawab membangun tanggul di pesisir pantai.

Kementerian PUPR dan pemerintah DKI kemudian berbagi jatah pembangunan tanggul tahap satu, masing-masing 20,9 kilometer dan 27,5 kilometer.

Pemprov DKI di bawah Gubernur Anies Baswedan baru merampungkan tanggul sepanjang di pesisir Muara Angke, Sunda Kelapa, dan Kali Boleang yang total anggarannya Rp 59 miliar. ● yan

Banjir Rob, Aktivitas Bongkar Muat di Pelabuhan Sunda Kelapa Terhenti

JAKARTA (IM) - Banjir rob yang merendam Kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa, Pademangan, Jakarta Utara, membuat aktivitas bongkar muat terhenti pada Senin (6/12) pagi. Di kawasan tersebut ketinggian air masih mencapai 40-50 cm.

Berdasarkan pantauan di lokasi, banjir ini terjadi sekitar pukul 09.30 WIB ini memiliki ketinggian 40-50 cm. Banjir rob ini juga merendam ruas Jalan Lodan Raya.

Sejumlah aktivitas bongkar muat barang di Pelabuhan Sunda Kelapa dihentikan sementara.

Termasuk aktivitas truk pengangkut barang pun tersendat. Hanya sedikit truk yang berani menembus air. Namun tidak sedikit juga truk yang memilih berhenti karena air yang deras.

Salah satu pekerja bongkar muat Andri (45) mengatakan, selama banjir rob kegiatan bongkar muat barang di Pelabuhan Sunda Kelapa dihentikan. "Dihentikan dulu, nanti kalau sudah surut mulai lagi. Kalau dibongkar kena banjir nanti barangnya hanyut rusak," kata Andri.

Menurut Andri, kondisi banjir rob yang paling parah terjadi pada Sabtu (4/12). Saat itu banjir rob menggenangi hingga setinggi dada orang dewasa. "Hari Sabtu sampai kena dada sekarang masih mendingan ini masih terus pasang," ucap Andri.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini banjir rob wilayah pesisir Jakarta yang diprediksi mulai tanggal 2 sampai 9 Desember 2021. ● yan

Jam Operasional Bus TransJakarta Diperpendek Jadi 22.30 WIB

JAKARTA (IM) - Jam operasional bus TransJakarta diperpendek dari 05.00-24.00 WIB menjadi 05.00-22.30 WIB. Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas PT TransJakarta (TransJakarta), Angelina Betris mengatakan kebijakan itu mulai berlaku Senin (6/12).

"Penyesuaian waktu layanan ini mulai berlaku Senin," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Minggu malam (5/12).

Betris berujar penyesuaian jam operasional itu berkaitan dengan status Jakarta yang

masuk PPKM Level 2. PT TransJakarta juga memfasilitasi masyarakat dengan Angkutan Malam Hari (AMARI). Kapasitas penumpang tetap 100 persen selama PPKM Level 2 hingga 13 Desember. Ketentuan ini berlaku di seluruh rute layanan BRT TransJakarta, mulai dari Koridor 1-13. "Dengan protokol kesehatan yang ketat," ujar dia.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Gubernur (Kepgub) Gubernur DKI Jakarta Nomor 1421 Tahun 2021 tentang Pember-

lakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Corona Virus Disease 2019.

Jam operasional bus TransJakarta yang hanya sampai pukul 22.30 itu juga mengacu pada Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Nomor 485 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengaturan Kapasitas Angkut dan Waktu Operasional Sarana Transportasi Pada Masa Pembatasan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 Corona Virus Disease. ● yan



JAKARTA JOB FAIR

Pencari kerja memindai barcode di salah satu stan perusahaan pada acara "Jakarta Job Fair" di Ratu Plaza, Jakarta, Senin (6/12). Jakarta Job Fair tersebut akan diselenggarakan di beberapa tempat yaitu Ratu Plaza, PGC Cililitan, Mangga 2 Square, Plaza Semanggi, dan Mal Taman Palem dari 6-14 Desember 2021.

PAM Jaya Butuh Rp7 Triliun Perbaiki Kebocoran Distribusi Air

JAKARTA (IM) - Direktur PT PAM Jaya Priyatno Bambang Hernowo menjelaskan, saat ini tingkat kebocoran distribusi air dari nonrevenue water atau NRW mencapai 46 persen. Persentase kehilangan distribusi air dari NRW itu diakibatkan pipa bocor, ketidakakuratan meter, data yang tidak tepat, dan illegal connection consumption.

"Bahwa memang sebagian besar kebocoran itu diakibatkan kebocoran fisik. Itu karena jaringan perpipaan kita yang sudah tidak ada, artinya banyak bocoran," ujar Bambang dalam keterangannya, Senin (6/12).

Bambang menjelaskan, kebocoran dari sektor NRW mengakibatkan jumlah air yang dikeluarkan oleh PAM Jaya tidak sama dengan yang diterima oleh masyarakat dan merugikan PAM Jaya. Menurut Bambang, idealnya kebocoran air dari NRW hanya 25 persen saja.

Bambang mengatakan pihaknya kini sedang berusaha menekan angka kebocoran tersebut menjadi 24 persen pada tahun 2023. Program menekan angka kebocoran ini bakal sejalan dengan usaha PAM Jaya memperluas jaring-

gan perpipaan di Jakarta yang membutuhkan biaya hingga Rp 30 triliun.

"Rp7 triliunnya untuk menurunkan NRW, dari 46 menjadi 24 persen tadi," kata Bambang.

Bambang menerangkan, angka pipa bocor tidak merata di setiap daerah. Ia mencontohkan seperti di daerah Pulomas, Jakarta Timur, angka kebocoran bahkan melebihi 60 persen. Kawasan seperti ini yang nantinya bakal menjadi prioritas PAM Jaya membenahi saluran pipa air.

Adapun salah satu penyebab pipa air PAM bocor, karena ada masyarakat yang mengambil air dari pipa distribusi secara ilegal. Hal ini terjadi karena akses perpipaan PAM Jaya yang belum masuk ke pemukiman warga tersebut.

Sehingga, Bambang mengatakan perluasan akses perpipaan PAM Jaya juga bakal sejalan dengan perbaikan kebocoran pipa. "Bahwa NRW itu harus diturunkan, iya, tapi ada step selanjutnya setelah penurunan NRW. Kami harus menambah jaringan ke daerah itu (yang belum tersambung pipa PAM)," kata Bambang. ● yan

CIKARANG PUSAT

(IM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menggelar apel besar peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke-57, Hari Ulang Tahun (HUT) PGRI Ke-76, HUT Korpri Ke-50, serta Hari Guru Ke-27, yang bertempat di Plaza Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, pada Senin (6/12).

Plt. Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki dalam amanatnya mengatakan, sejalan dengan tema Peringatan HUT Korpri Ke-50 "ASN Bersatu, Korpri Tangguh Indonesia Tumbuh" dirinya mengajak seluruh jajaran pengurus Korpri dan seluruh ASN di Kabupaten Bekasi, untuk meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik untuk mencapai hasil kinerja yang optimal.

"Pada momentum ini, ASN Kabupaten Bekasi juga harus menyatukan korsa dan komitmennya untuk meningkatkan pengabdian dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik," tuturnya dalam rilis Prokopim Setdakab Bekasi, Senin (6/12).

Selain itu, dengan semangat HUT Korpri Ke-50, ia juga mengajak seluruh jajaran ASN untuk memperkokoh jiwa korps, serta meningkatkan profesionalitas dan integritas ASN sebagai anggota Korpri, serta menjadi pioner untuk mewujudkan pemerintah digital.

"Mari kita memperkokoh jiwa korps, dan pemerintah yang berbasis teknologi, karena



Plt. Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki (gambar atas, tengah, menghadap kamera) dan penerima Satya Lencana, penerima penghargaan nakes teladan 2021, penerima bantuan usaha mikro, penerima santunan yatim piatu, dan pesapon foto bersama saat Apel Besar HKN Ke-57, HUT Korpri Ke-59, Hari Guru di Plaza Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Senin (6/12).

serta ini kita sudah memasuki era pemerintahan digital, di mana tuntutan tata kelola pemerintahan harus efisien dan pelayanan publik harus lebih cepat," jelasnya.

Lebih lanjut, dirinya juga

mengatakan dengan semangat HUT PGRI Ke-76 dan HGN Ke-27, diharapkan guru dapat memberikan layanan pendidikan kepada anak didik dengan baik dimasa pandemi Covid-19. Karena selama pan-

FOTO: DOK.PIM PROKOPIM SETDAKAB BEKASI

guru maupun siswa. Kebiasaan baru membuat guru mau tidak mau, suka tidak suka untuk beradaptasi dengan teknologi masa kini, kompetensi guru dalam mengakses teknologi inilah yang menjadi tantangan baru," ucapnya.

Tidak hanya itu, Ia juga meminta seluruh ASN harus berperan aktif dalam melaksanakan prokes Covid-19 dalam segala aktifitas. Ia juga menyampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar Korpri, PGRI, serta petugas kesehatan yang telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

"Saya selaku Plt. Bupati Bekasi menyampaikan terimakasih kepada keluarga besar Korpri, PGRI, dan petugas kesehatan yang telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Saya berpesan kepada semuanya agar selalu menjaga prokes dengan baik, karena pandemi masih belum usai," pungkasnya.

Dalam acara tersebut, juga dilakukan penyerahan Satya Lencana masa kerja 30th, Satya Lencana masa kerja 20th, serta Satya Lencana masa kerja 10th. Dilakukan juga penyerahan Kadetuh yang meliputi, penyerahan Penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan 2021, penyerahan bantuan usaha mikro, penyerahan santunan yatim piatu, serta penyerahan santunan Dhuafa/pesapon. ● mdl